

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DUSUN KANAR DESA LABUHAN BADAS KECAMATAN LABUHAN BADAS

Syaifuddin Iskandar¹, Ari Kurniawan^{2*}, Heri Kurniawansyah, HS³, Sri Nurhidayati⁴

¹²³⁴Universitas Samawa, Sumbawa Besar

Penulis Korespondensi: arikurniawan13@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: 28 Mei 2023</i> <i>Revised: 08 June 2023</i> <i>Published: 30 June 2023</i>	Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) serta untuk mengetahui faktor penghambat serta upaya dalam menangani hambatan dalam proses Implementasi PKH di Dusun Kanar Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah informan. Alat analisis data yaitu dengan menggunakan teori Miles and Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten Sumbawa, telah melaksanakan PKH seperti : mengadakan sosialisasi, validasi, pemutakhiran data dan penyaluran PKH. Adapun faktor penghambatnya yaitu : Adanya penghilangan nama KPM PKH dari pusat, Adanya masyarakat yang sudah tidak masuk dalam kategori PKH tetapi tidak ingin melepas bantuannya, serta tidak ada cadangan kartu KKS (media pencairan PKH) jika hilang ataupun rusak.
Keywords <i>Implementasi;</i> <i>ProgramPKH;</i> <i>Kesejahteraan Masyarakat;</i>	

PENDAHULUAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk kekeadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.

Kemiskinan merupakan bentuk ketidakmampuan untuk meraih kesejahteraan dipandang dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan juga merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi setiap Negara, terutama Negara berkembang, bahkan ini menjadi butir pertama dari *Sustainable Development Goal (SDGs)* atau disebut “Tujuan pembangunan berkelanjutan” yang dideklarasikan oleh Negara-negara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September tahun 2015 lalu.

Kemiskinan yang terjadi di setiap Negara seakan terus menjadi kemiskinan yang bersifat dari masa ke masa. Sebagian besar masyarakat di Indonesia merasa dihambati dan terbelenggu hidup sulit karena kurang terpenuhinya hak-hak dasar mereka seperti kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kondisi tempat tinggal, dan juga tidak tertinggal dampak yang mereka hadapi akibat dari kenaikan BBM yang bermula pada tahun 2008 hingga sampai saat ini. Akibatnya tidak jarang anak-anak beserta keluarga mereka harus ikut terejebak untuk ikut memikul beban bekerja sebagaimana yang dialami oleh orang tua mereka masing-masing.

Kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM tersebut mengakibatkan harga kebutuhan pokok terus meningkat dan bagi masyarakat kategori miskin tentu mengakibatkan daya beli mereka juga akan semakin menurun, karena mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan harga pasar. Masyarakat tentunya akan terkena dampak sosial yaitu semakin menurunnya taraf kesejahteraan kehidupannya dan menjadi semakin sulit dan miskin. (Petunjuk Teknis Penyaluran BLT, 2008:1).

Untuk menyikapi hal tersebut pada bulan April 2016, kementerian sosial (KEMENSOS) meluncurkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dikirim melalui PT Pos Indonesia ke masyarakat. KKS adalah salah satu media pencairan dari program PKH dalam penanggulangan kemiskinan saat kebijakan kenaikan BBM. Pemerintah dengan kebijakan membentuk suatu program dalam penanggulangan kemiskinan seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang termasuk dalam program produktif bersama program Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dimana program ini merupakan program pengganti kartu yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai penanda keluarga kurang mampu. Dengan adanya pelaksanaan program ini, pemerintah dapat meningkatkan martabat keluarga kurang mampu dengan perlindungan dan pemberdayaan.

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bantuan untuk masyarakat miskin sesuai dengan intruksi Presiden Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang “Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif, Sosialisasi kebijakan penyesuaian Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini bertujuan untuk mengurangi masalah kemiskinan dan untuk meningkatkan kesejahteraan yang sesuai dengan Intruksi Menteri dalam Negeri No.541/3150/SJ tentang pelaksanaan dan pembagian Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KKS) Sebagai Kartu pengganti Program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dari (APBN-P 2014) Kartu Keluarga Sejahtera memiliki 2 jenis program bantuan sosial yaitu bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial Sembako.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka, sedangkan bantuan sosial sembako diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam bentuk kebutuhan pokok seperti beras dan telur yang berupa karbohidrat dan protein baik berupa protein nabati dan hewani. Masyarakat yang tergolong dalam penerima PKH sudah pasti mendapatkan bantuan sosial sembako tetapi masyarakat yang tergolong dalam penerima bantuan sosial sembako tidak pasti mendapatkan

bantuan sosial PKH. Program Keluarga Harapan telah banyak disalurkan disetiap daerah di Indonesia, Salah satunya yaitu di Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Besar (NTB) yang berupa bantuan sosial PKH. Dari data yang ada penerima PKH di Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas yaitu sebanyak 239 KK. Tidak hanya PKH di Desa Labuhan Badas juga terdapat bantuan-bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan-bantuan sosial lainnya yang diadakan oleh pemerintah selama masa pandemi. Setiap peluncuran program bantuan selalu timbul polemik dimasyarakat, Seperti di Desa Labuhan Badas dalam peluncuran PKH ini, banyak masyarakat desa Labuhan Badas mengeluh masih ada rumah tangga yang kurang mampu tidak mendapat bantuan, masih ada kartu yang muncul meskipun nama pemegangnya sudah meninggal, bahkan rumah tangga yang seharusnya sudah tidak menerima tetapi masih muncul sebagai rumah tangga sasaran program.

Banyak sekali Pro-Kontra yang terjadi dalam masyarakat desa Labuhan Badas dalam implementasi Program Keluarga Harapan , Sebagian masyarakat menolak adanya program ini dikarenakan banyak yang berpendapat bahwa program tersebut dapat menimbulkan budaya malas pada masyarakat dan menimbulkan ketergantungan pada program pemerintah, ditambah lagi dalam penyalurannya terkadang tidak tepat sasaran. Bagi Masyarakat yang menerima program tersebut masyarakat berpendapat dengan adanya program tersebut masyarakat terbantu dengan bantuan yang diberikan meskipun jumlah bantuan yang diberikan tidak banyak akan tetapi bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkannya karena dapat membantu pemasukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan Kartu Keluarga Sejahtera melalui penelitian yang berjudul : “Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Dusun Kanar Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas”.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata yang disusun dalam kalimat dan didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa tersebut, dimana penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita fenomena sosial tertentu sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan yang mungkin dihadapi. Menurut Moleong (2004:6) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahas, pada konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. David Williams (1999). Sebagai penelitian deskriptif, penelitian ini berisikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual, akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dimana dalam pengumpulan datanya peneliti

menggunakan teknik pengumpulan data antara lain: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi atau mengambil lokus di Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa dan Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas. Sumber data dalam penelitian ini didapat dari data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan ; Sekretariat UPPKH : - Koordinator UPPKH Kabupaten Sumbawa, Pendamping PKH Desa Labuhan Badas, Sekteraris Desa Labuhan Badas, dan Ketua Kelompok PKH. Hal tersebut dengan pertimbangan untuk mendapatkan informasi serta data yang valid dan akurat berkaitan dengan objek penelitian. Analisa Data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Proses analisa data dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Pemeriksaan keabsahan data untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti akan menggunakan teknik Triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang peneliti temukan dilapangan terdapat beberapa tahapan proses dalam mendapatkan program keluarga harapan di Dusun Kanar Desa Labuhan Badas adalah sebagai berikut:

a). Melakukan Sosialisasi

Pendamping PKH dari Sekretariat UPPKH yang berada dibawah naungan Dinas Sosial melakukan sosialisasi kepada ketua kelompok penerima PKH yang diselenggarakan di kantor Desa Labuhan Badas yang bertujuan untuk mensosialisasikan terkait bantuan PKH.

Informan pertama yang peneliti wawancara adalah Pendamping PKH dari Sekretariat UPPKH yang berada dibawah naungan Dinas Sosial yaitu Ibu Sri Hartati untuk mengetahui proses sosialisasi sebagai berikut: “Kita dari pihak pendamping PKH mensosialisasikan ini ke ketua kelompok masing masing untuk memberitahukan kepada kelompoknya masing masing untuk memberikan arahan berupa kesiapan berkas yang dibutuhkan dalam rangka penyaluran bantuan PKH, kita sengaja hanya mengundang ketua kelompok saja, agar meminimalisir terjadinya polemik dilapangan”.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan pertama selaku pendamping PKH yang mensosialisasikan terkait program PKH kepada ketua kelompok, dapat dilihat bahwa pembimbing melakukan sosialisasi kepada ketua kelompok masing masing dengan materi terkait persiapan apa saja yang dibutuhkan dalam rangka persyaratan untuk menerima program PKH yaitu seperti melengkapi data berupa kartu keluarga dan KTP guna melengkapi data dari penerima program PKH.

Informan kedua yang peneliti wawancara adalah Ibu Tampawan selaku ketua kelompok penerima PKH yang di selenggarakan oleh pendamping PKH menyatakan bahwa : “kalo untuk persiapan berkas kami hanya disuruh menyiapkan kartu keluarga dan KTP sebagai persyaratan pencairan dari program PKH dan juga sebagai kelengkapan data penerima program bantuan itu: Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa proses awal dari penyaluran PKH tersebut

pertama-tama diadakannya sosialisasi sebagai bentuk penyampaian persyaratan penarikan dan arahan kepada KPM PKH yang namanya telah ada di pusat, dalam sosialisasi tersebut masyarakat dikumpulkan dalam suatu ruangan atau tempat yang sama untuk diberikan bekal atau tata cara pencairan bantuan PKH oleh pendamping.

b). Pertemuan Awal dan Validasi

Kegiatan awal dapat dilaksanakan sekaligus untuk melakukan validasi data dengan mencocokkan data awal calon peserta PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sehingga diperoleh data yang valid dan sesuai dengan kriteria komponen PKH. pernyataan dari Ibu Sri Hartati selaku pendamping PKH bahwa : “Untuk pertemuan awal kita sebagai pendamping mensosialisasikan kepada calon pemegang Kartu Keluarga Sejahtera tentang apa saja berkas yang harus dilengkapi dan sekaligus menjelaskan apa saja kegunaan dari KKS itu sendiri”. Dalam pertemuan awal pendamping memberikan arahan kepada KPM PKH yang telah terdaftar dan mendapatkan kategori untuk mengumpulkan persyaratan kelengkapan data untuk proses pencairan bantuan tersebut.

c). Pemutakhiran data PKH

Pemutakhiran data adalah proses perubahan data terkini sebagian atau seluruh data anggota keluarga penerima manfaat PKH. Pemutakhiran data bertujuan untuk : Melakukan perekaman perubahan data dengan memutakhirkan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota keluarga penerima manfaat PKH.

d). Penyaluran Bantuan Sosial

Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan secara non tunai. Bantuan sosial PKH dicairkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau buku tabungan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Pembukaan rekening penerima bantuan sosial Rekening penerima bantuan sosial dibukakan secara kolektif secara terpusat sesuai data yang telah diserahkan dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI ke Bank Penyalur.
- 2) Pembukaan rekening diikuti dengan pencetakan buku tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera serta PIN Mailer.
- 3) Sosialisasi dan edukasi Kegiatan sosialisasi dan edukasi merupakan aktivitas untuk menyampaikan informasi kepada pihak terkait tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai. Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh Kemensos RI bersama Bank Penyalur dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- 4) Distribusi KKS kepada KPM Bank penyalur melakukan kegiatan penyerahan KKS, buku tabungan dan PIN mailer kepada penerima manfaat PKH. Untuk kelancaran pendistribusian KKS dan buku tabungan Bank Penyalur berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat.
- 5) Proses penyaluran bantuan sosial KPM Penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari pemberi bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial melalui bank penyalur.

- 6) Penarikan dana bantuan sosial PKH Penarikan dana bantuan sosial PKH adalah kegiatan KPM melakukan transaksi penarikan dana PKH yang dapat dilakukan di layanan yang disediakan oleh lembaga bayar seperti ATM, Kantor Bank, Agen bank dan e-warong.
- 7) Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH Merupakan kegiatan pencocokkan dan pengecekan administrasi, data dan dana hasil penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara berjenjang antara pelaksana PKH dengan bank penyalur. Kegiatan pengecekan data penyaluran dilakukan menggunakan aplikasi e-PKH oleh SDM PKH pada setiap KPM PKH yang telah menerima bantuan, ataupun yang belum menerima bantuan. Pada saat pengecekan data penyaluran KPM, SDM PKH memberikan informasi KPM melakukan pencairan atau tidak melakukan pencairan. SDM PKH memberikan informasi penyebab KPM tidak dapat melakukan pencairan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 8) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Sosial Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bantuan sosial adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, Pelaksana PKH di daerah dan Bank Penyalur untuk memastikan bahwa bantuan telah diterima oleh KPM.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan yaitu di Dusun Kanar Desa Labuhan Badas terdapat beberapa proses dan tahapan dalam Program Keluarga Harapan, dimana data KPM penerima PKH tersebut dikirimkan oleh pusat melalui post dan diberikan kepada masing-masing pendamping di setiap Kecamatan khususnya di Kecamatan Labuhan Badas tepatnya di Dusun Kanar Desa Labuhan Badas, dari data yang diperoleh dari hasil wawancara bahwa Ibu Sri Hartati selaku pendamping PKH di Desa Labuhan Badas mengatakan: “Untuk prosesnya dalam pemberitahuan nama-nama penerima PKH kepada masyarakat itu kami sebagai pendamping turun langsung mengantarkan amplop yang berisi nama KPM PKH dan sebuah Kartu, setelah itu kami arahkan kepada para penerima PKH tersebut untuk berkumpul di rumah masing-masing ketua kelompok untuk kami beri arahan dan tata cara pengambilan bantuan tersebut.”

Adapun persyaratan atau kategori dalam penerima PKH adalah yakni sesuai dengan hasil wawancara bersama ibu Sri Hartati selaku pendamping PKH Desa Labuhan Badas yang mengatakan bahwa : “Kategori penerima bansos PKH diantaranya, ibu hamil, anak balita, usia 0-6 tahun, anak sekolah (SD,SMP, dan SMA), penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia (lansia).”Jumlah bantuan untuk setiap KPM PKH nominalnya berbeda-beda sesuai dengan jumlah anak, ibu hamil ataupun lansia yang berada di rumah KPM PKH tersebut.

Proses pengambilan bantuan PKH tersebut dilakukan oleh KPM yang namanya terdaftar dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain, persyaratan yang diperlukan untuk mencairkan dana PKH adalah KK, KTP, SKTM, rekening aktif disalah satu bank negara dan uga bukti terdaftar di pusat, baru setelahnya dana PKH akan dicairkan dan diterima oleh KPM sesuai dengan kategori bantuan yang didapatkan.

Kendala dalam Program Keluarga Harapan di Dusun Kanar Desa Labuhan Badas

Dalam setiap program kebijakan yang dilaksanakan pasti ada hambatan dan kendala yang dihadapi, karena suatu kebijakan akan sulit atau bahkan tidak akan mungkin bisa berjalan dengan lancar pasti akan ditemukan kesalahan, kekeliruan dan kurangnya respon dari pihak yang menerima program, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Mardinawan selaku Koordinator PKH Kabupaten Sumbawa yang mengatakan bahwa : “Untuk kendala dari program PKH itu sendiri dari kita para pendamping adanya penghilangan daftar nama KPM PKH dari pusat tanpa adanya pemberitahuan terlebih dulu sehingga kami kesusahan untuk memberikan pengertian kepada KPM yang sudah tidak terdaftar lagi”.

Kendala lainnya juga disampaikan oleh Bapak Mukhlis selaku Sekretaris Desa Labuhan Badas yang mengatakan bahwa : “Dalam setiap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah salah satunya yaitu tentang program bantuan sosial ini, dimasyarakat Desa Labuhan Badas ini memiliki kendala seperti adanya kecemburuan sosial yang dimana contohnya itu jika salah satu masyarakat mempunyai kategori bantuan PKH tetapi namanya tidak terdaftar dipusat maka itu yang membuat adanya kecemburuan sosial, ditambah lagi dengan adanya pembaruan data dari pusat yang mengatakan bahwa salah satu KPM sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan PKH tersebut tetapi ada beberapa masyarakat yang tidak ingin melepaskan bantuan tersebut sehingga menimbulkan permasalahan bagi pemerintah desa dan masyarakat”.

Selain itu, jika ingin mengganti KKS baru atau menghilangkan KKS maka tidak ada cadangan lagi yang tersedia jadi diusahakan untuk tidak hilang atau rusak KKS yang dipegang oleh masing-masing KPM. Jadi dari kendalakendala yang ada dalam proses implementasi PKH di Dusun Kanar bahwa terdapat kebijakan mengenai PKH yang dilaksanakan oleh Pemerintah tanpa adanya koordinasi antara pihak Pemerintah dengan Pendamping PKH, hal tersebut membuat adanya berbagai macam pendapat yang timbul dari KPM PKH maupun pendamping, meskipun begitu para pendamping PKH selalu mengoptimalkan tanggung jawab yang diberikan oleh Pemerintah dalam proses implementasi PKH tersebut.

KESIMPULAN

Implementasi PKH di Desa Labuhan Badas Khususnya di Dusun kanar telah dilaksanakan dari tahun 2014 hingga saat ini, dalam setiap tahun terdapat 4 tahap dalam proses pencairannya, proses pelaksanaan bantuan PKH tersebut terbilang sudah berjalan dengan baik hanya saja masih terdapat beberapa kendala tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi proses penyalurannya di Desa Labuhan Badas hanya masalah yang terjadi itu berasal dari teknis atau aturan baru yang tetap diperbaharui setiap tahunnya jadi dalam proses penyalurnya itu ada beberapa yang berbeda. Adapun kendala dalam Program Keluarga Sejahtera di Dusun Kanar Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas antara lain : Adanya penghilangan nama KPM dari pusat tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu, Terdapat beberapa masyarakat yang

tidak ingin melepaskan bantuannya meskipun sudah tidak layak mendapatkannya, Kartu yang diberikan atau tanda bukti penerima bantuan PKH tersebut tidak memiliki cadangan sehingga jika rusak atau hilang tidak ada gantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasiah, A Chaedar. (2006). *Pokoknya Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Denzin., Eds Michele D. Giardina, Walnut Creek. (2006). *Penyelidikan Kualitatif dibawah rezim konservatif*. CA: Lift Coast Press
- Wahab, Solichin Abdul. (1991). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Raco, J.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan keunggulannya*. Jakarta: Grasindo
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.